### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Penelitian

Jean Jacques Rousseau (Rousseau) lahir di Jenewa, Swiss pada tahun 1712, Ia dikenal sebagai pencetus teori politik dan penyelenggaraan Negara melalui tulisannya perjanjian social (*du contract social*) yang membawa pada ketenarannya. Ia adalah seorang pemikir Prancis berkebangsaan Swiss yang ideal pandangannya meliputi filsafat, kesusastraan, politik dan bapak gerakan romantik.<sup>1</sup>

Rousseau menghabiskan waktu kanak-kanaknya bersama ayahnya Issac Rousseau yang merupakan seorang miskin tukang jam sekaligus menjadi figur yang begitu berpengaruh terhadap pembentukan watak dan pemikirannya, bersama ayahnya menghabiskan malam masa kanak-kanaknya membaca karya klasik *Plutarch*, sampai ia dewasa menjadikannya memiliki kepekaan dan kehalusan jiwa daripada logika dan rasional. Rousseau banyak menghabiskan hidupnya dengan banyak membaca karya filsuf besar seperti Pufendorf dan Grotius, juga pengarang Inggris abad sebelumnya, Hobbes dan Locke. Ia bergaul juga dengan para filosofi, yakni sekelompok cendekiawan yang berjuang melakukan perubahan otoriterianisme serta kekolotan agama yang mencandui kehidupan intelektual Prancis selama Louis XIV. <sup>2</sup> Yang kemudian mengamalkannya dalam bentuk tulisan-tulisannya yang kini dikenal. Ia juga dikenal sebagai penganut setia calvinisme.

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Firdaus syam, *Pemikiran Politik Barat. Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke-3*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hlm 149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*. hlm 150

Rousseau memang terkenal di zamannya, terutama karena tulisannya berbahasa Prancis yang merupakan bahasa yang menjadi bahasa peradaban Eropa selain dialah tokoh revolusi yang sangat berpengaruh di Prancis . Karya besarnya adalah Tulisan *Du contract social* (1762) yang membahas perpolitikan mengenai peranan Negara untuk membebaskan hak individu yang lahir secara alamiyah. Juga dikenal karyanya *Emile; Ou L'education* karya yang sarat akan filsafat pendidikan.<sup>3</sup> Di akhir hidup dalam pengembaraannya mengalami psikis merasa terus dikejar-kejar dan ancaman yang datang dari musuh-musuhnya,di desa Ermenonville pada tahun 1778 Jean Jacques Rousseau meninggal dunia.

Negara Barat yang semula berada pada fase kegelapan berawal dari proses interaksi peradaban besar yang telah ada sebelumnya. Peradaban itu terdiri atas; Yunani-Romawi, Judeo-Kristiani dan Islam. Setelah runtuhnya tiga peradaban besar itu, memberi pupuk penyubur bagi tumbuhnya suatu peradaban baru di Barat. Masa kegelapan yang panjang di Negara Barat membuat mereka ingin terlepas dari masa kegelapan itu dengan mereka belajar dari kemajuan serta keunggulan peradaban sebelumnya.

Alfred North Whitehead (*filsuf terkenal AS*) menyatakan "sejarah seluruh filsafat Barat hanyalah rangkaian dari catatan kaki (*footnote*) Plato dan Aristoteles. Melalui pemikiran Plato dan Aristoteles, peradaban Yunani klasik mempengaruhi secara subtansial dan signifikan lahirnya peradaban Renaisans (abad XIV-XVI) serta tradisi intelektual muslim abad tengah. Pengaruh itu

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, hlm 154

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat. Sejarah, Filsafat dan Ideologi dan Pengaruhnya terhadap Dunia ke-3* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) Hlm 1

Nampak dalam karya-karya keilmuan: Al-Farabi dengan karya nya *Madhinah Al-Fadhilah* (Negara Utama), ibnu sina Avempace, ibnu Rusyd, Imam Ghazali"<sup>5</sup>

Jauh sebelum Rousseau mengungkapkan konsepsi negara, Aristoteles (384-3220 SM) menyatakan kemunculan negara karena adanya konsepsi bersama antar individu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia, karena manusia merupakan *Zoon Politicon* tidak dapat hidup sendiri dan memiliki sifat saling ketergantungan antar individu. Negara ideal bagi Aristoteles seperti *Polis* atau *city stat*.

Rousseau (1712-1728 M) menggambarkan masyarakat dalam keadaan alami sebagai bebas, bahagia, independen, amoral, polos, dan terisolasi. Mereka kebutuhan akan pelayanan dan penghormatan dari yang lain dan pada umumnya memuaskan hasrat-hasrat minimum mereka secara independen. Meskipun manusia pada faktanya merupakan makhluk yang membutuhkan yang lain, tidak serta merta komponen individu didalam suatu masyarakat akan bekerja sama. Mereka bekerja sama dalam rangka mencari keuntungan secara timbal balik demi kepentingan pribadi. Sehingga hubungan-hubungan yang ada hanya bersifat sementara dan berkesesuaian. Tidak ada ikatan yang kokoh di dalam suatu masyarakat ketika itu.

Hal ini melahirkan individu-individu borjuis yang pada prinsipnya hanya mementingan dirinya sendiri. Untuk memperoleh kebaikan pada dirinya, individu borjuis menggunakan masyarakat, mengeksploitasi mereka. Orang borjuis membedakan tujuannya sendiri dari kebaikan bersama. Kondisi inilah yang lahir

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kabul Budiono, *Teori dan filsafat ilmu politik* (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm 84

di kebanyakan masyarakat eropa, sehingga rousseau berpendapat bahwa pentingnya belajar tentang saling ketergantungan, loyalitas, dan komunitas untuk menciptakan ikatan yang kokoh demi kepentingan bersama.

Kekuasaan dalam pandangan Rousseau identik dengan kehendak rakyat, Negara hanya sebagai alat untuk melegitimasi kehendak rakyat. Disinilah pemikiran Rousseau sebagai tokoh revolusi di Prancis yang dituangkan dalam tulisannya du contract sosial ketika menggulingkan pemerintahan Louis XIV dengan pemerintahannya yang Feodal, yang menurutnya pendeskriminasian terhadap rakyat jelata. Maka disinilah dapat diketahui bahwa terbentuknya suatu Negara bagi Rousseau menganut teori kedaulatan rakyat.

Untuk menciptakan keselarasan didalam banyaknya perbedaan fitrah manusia, maka sebuah masyarakat harus dibangun atas dasar kehendak umum. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang merasa seseorang menganggap dirinya tuan atas yang lain, menghindari perbudakan dan ketimpangan sosial lainnya. Kehendak umum inilah yang menjadi integrasi sosial dalam pandangan J.J Rousseau, sehingga penyelenggaraan suatu Negara tidak atas dasar paksaan, kekerasan, dan kesewenang-wenangan dengan adanya kontrak/perjanjian sosial.

Dalam perspektif islam hal ini sudah dikemukakan oleh seorang filsuf muslim bernama Abu Nasar Muhammad bin Muhammad bin tarchan (260 H/870 M), lebih akrab dengan sebutan Al-Farabi. Al-Farabi merupakan sarjana muslim pertama yang mengemukakan konsepsi politik kenegaraan, al-Farabi menjelaskan Negara dibentuk berdasarkan kemauan dari manusia yang sama kepentingannya

serta sama akan tujuannya. Kemauan yang sama inilah yang kemudian hari dikemukakan oleh J.J Rousseau dengan istilah *Volunte Generale*.

Negara ideal bagi Rousseau haruslah tidak teralu besar dan tidak terlalu kecil, karena Negara yang luas akan menyukarkan penyertaan rakyat dan negara yang terlalu luas sulit untuk mempertahankannya. Negara ideal bagi rousseau adalah Negara seluas Polis (*polis state*). Rousseau dalam praktiknya menolak adanya lembaga perwakilan rakyat dituntun untuk berkiprah langsung didalam kegiatan pemerintah dan membuat suatu keputusan serta mempertanggung jawabkan apa yang telah diputuskannya. hal ini pun sebelumnya telah dicetuskan oleh al-Farabi dengan konsep Negara Utama (*madhinatu al-Fadhilah*). Menurut al-Farabi Negara itu berasal dari masyarakat kota.

### B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dari penelitian *Pemikiran*Jean Jacques Rousseau Tentang Masyarakat dan Penyelenggaraan Negara dalam

Perspektif Islam adanya rangkaian sejarah yang mengkontribusi majunya Dunia

Barat. Maka pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:

- Bagaimana Konsep masyarakat dalam pandangan Jean-Jacques Rousseau dan al-Farabi?
- 2. Bagaimana penyelenggaraan Negara dalam pandangan Jean-Jacques Rousseau dan Al-Farabi?
- 3. Apa landasan pemikiran Jean-Jacques Rousseau dan al-Farabi tentang Masyarakat dan Penyelenggaraan Negara?

5

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*. (Bandung: Mizan, 1999). Hlm 156

# C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut.:

- Mengetahui konsep masyarakat menurut pandangan Jean-Jacques Rousseau dan alk-Farabi.
- Mengetahui penyelenggaraan Negara menurut pandangan Jean-Jacques Rousseau dan al-Farabi.
- 3. Mengetahui landasan pemikiran jean-Jacques Rousseau dan al-Farabi tentang masyarakat dan penyelenggaraan Negara.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.:

# a. Kegunaan secara Teoritis

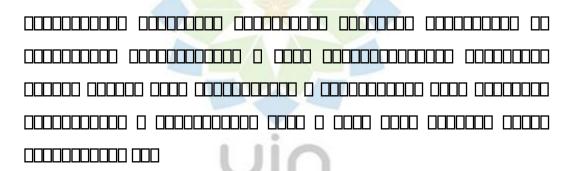
- Menambah wawasan penulis dalam memahami pemikiran J.J Rousseau.
- 2. Memperkaya khazanah keilmuan akademisi dalam bidang pemikiran politik dan sejarah.
- 3. Mendeskripsikan latar belakang pemikiran J.J.Rousseau

# b. Kegunaan secara praktis

- Mempublikasikan teori-teori yang bisa dijadikan landasan dalam aspek sosial maupun politik.
- 2. Membandingkan antara teori-teori yang ada dengan kondisi kekinian yang masih relevan untuk bisa dijadikan sandaran.
- 3. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar.

# D. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan metode analisis komparatif maka kerangka pemikiran J.J Rousseau adanya perbedaan antara pemikiran politik islam dan pemikiran politik Barat. Dalam Islam mengatur beberapa sifat dan sebagai dasar etika politik islam. Diantaranya,(1) 'adalah, ialah adil/keadilan yang diperintah Allah pada setiap manusia, terutama pada seorang pemimpin diwajibkan adil pada rakyatnyaa baik dalam hal pemutusan perara maupun bersikap adil pada orang non muslim yang dipimpinnya



Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah:8)

(2) *al-Musawwah*, yakni persamaan. Bahwa rakyat harus diperlakukan sama didepan hukum, tidak membandingkan yang kaya dan miskin, bahwa manusia itu sama dihadapan Allah yang membdakan hanya taqwa nya kepada Allah. (3) *Syuroo*, atau musyawarah.

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

(4) .al-Huriyyah atau kebebasan yakni setiap orang memiliki hak untuk mengambil keputusan yang menurutnya terbaik, namun kebebasan ini dibatasi oleh hak allah yang tertuang pada syari'ah atau hukum-hukum Allah. Dengan demikian hak manusia dibatasi oleh hukum Allah, hukum Allah diatas segalanya yang harus ditaati.

Sedangkan dalam politik Barat dikenal istilah yang serupa dengan istilah yang ada pada etika politik islam, namun tidak membatasi dalam aplikasinya dan hanya menghormati akal manusia. Yakni (1) HAM, hak asasi manusia yang dicetuskan untuk menghormati keputusan yang diambil oleh seseorang, amun ham ini lahir di Barat dan tidak dibatasi oleh hal yang mutlak. Dalam HAM ini pula menganut prinsip kesamaan dan tidak memihak. (2)civil society, menjamin kesejahteraan rakyat yakni adanya perdamaian dan kesatuan. (3) Demokrasi, yakni bahwasanya rakyatlah yang memegang kekuasaan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Setiap keputusan disetujui oleh kepentingan bersama.

Liberalisme juga salah satu yang dikenal di Barat yang menjadi tolak ukur politik di Barat. Menerangkan kemunculan modernitas pencerahan dan masa

modern awal dan liberal klasik, pertama-tama membandingkan dunia kuno dan abad pertengahan dengan apa yang disebut sebagai modernitas. Kemudian dibahas revolusi utama yang melahirkan modernitas dan kemunculan tatanan dunia liberal baru yang berbeda jauh dari dunia sebelumnya

Secara etimologis, liberal berasal dari kata atau bahasa latin yang berarti free. Selanjutnya, liberal berarti nonrestricted; tidak dibatasi atau independent in opinion; bebas dalam berpendapat. <sup>7</sup>Ciri-ciri ideologi liberal diantaranya: <sup>8</sup> (1) mementingkan individu (The Emphasis on the individual). Yakni faham yang Mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar semua orang mengerahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan memelihar<mark>anya se</mark>rta tidak ada yang menjahatinya, (2) Memperlakukan pemikiran orang lain secara sama (treat the other's reason equality). (3) Percaya terhadap persamaan dasar semua manusia (hold the basic equality of all human). (4) Kebebasan berbicara (free of speackers). Dalam berpolitik, setiap individu bebas melakukan pendapat, melakukan kritik dan debat mengenai berbagai masalah yang ada dan dibincangkan masyarakat umum. (5) sekulerisme, Agama bukan pandangan hidup, ia hanya sarana untuk pemenuhan rohani serta spiritual. Mereka tidak anti Tuhan, akan tetapi agama tidak perlu melibatkan peranannya terhadap politik. (6) Pluralisme, dari faham sekuler lahirlah faham pluralism yang menganggap semua agama adalah benar dan diharuskannya saling menghormati antar sesame penagut agama. (7) Menolak Dogmatis (refuse dogmatism), ini disebabkan filosofis kaum liberal kapitalis

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Maxime Rodinson, *Islam dan Kapitalisme*, (Bandung, Iqra, 1982), hlm 31

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta, Bumi aksara, 2010), hlm 263

adalah rasioanlisme. Pengagungan akan kemampuan berpikir manusia, menempatkan hal yang bersifat doktrin menjadi tidak menarik bagi penganut ini.

Aliran filsafat yang melandasi liberal diantaranya; (1) aliran *naturalis*, berpendapat bahwa sistematika dalam dasar alami pembenarannya hanya dibuktikan dengan pengkajian yang fakta bukan berdasar teori metafisis. John Lock, J.J Rousseau machiavelli, Ahli pikir naturalisme liberal yang menurutnya hak milik pribadi merupakan salah satu hak alam dan insting yang tumbuh bersama pertumbuhan manusia. (2) aliran *individual*, setiap orang bertanggung jawab pada dirinya bukan orang lain. Tidak berggantung pada orang lain. Pemikir aliran liberal ini antara lain adam smith. (3) *utilitiarisme*, sesuatu dikatakan baik jika member manfaat atau kegunaan yang baik. Tokoh yang mendasari aliran ini David Hume, ia sebagai tokoh penemu pragmatism yang integrative, bahhwa hak milik khusus adalah hak milik yang dianut masyaraat yang harus diikuti, sebab disanalah manfaat mereka. (10)

Konsep liberal yang dicetuskan oleh Rousseau merupakan kebebasan yang alami, bahwasanya manusia pada hakikatnya memiliki kekebasan sejak lahir. Sifat alamiyah ini yang membawa manusia untuk dapat mengambil keputusan yang dikehendakinya dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambilnya. Oleh sebab itu, ini menjadi salah satu faktor mencetusnya revolusi di Prancis yang menggulingkan kekuasaan feodal menjadi demokrasi, yakni kedaulatan ditangan rakyat.

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Firdaus syam, *Pemikiran Politik Barat: sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhny terhadap dunia ke-3.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hlm 262

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid, hlm 263

Revolusi merupakan suatu konsep yang merupakan satu aspek modernisasi. Pasang surutnya kemegahan dinasi dikerajaan-keraajaan masa lampau maupun maju mundurnya perubahan dari oligarki menjadi demokrasi di Negara-negara yunani memang merupakan tahap-tahap revolusi kekerasan politik, tetapi jelas bukan revolusi social. Lebih tepat jika revolusi merupakan ciri khas modernisasi. Revolusi merupakan cara memodernisasikan masyarakat tradisional dan sudah tentu revolusi masih terasa asing bagi masyarakat tradisional di dunia barat seperti juga belum pernaha dikenal oleh masyarakat tradisional dimanapun. Revolusi ialah ekspresi terakhir pandangan modernitas, yakni keyakinan bahwa kekuatan manusialah yang mengendalikan dan mengubah lingkungan dan bahwa manusia tidak hanya memiliki kemampuann itu saja tetapi juga mempunyai hak untuk berbuat seperti itu. <sup>11</sup>

Pemikiran politik modern ditandai oleh lima revolusi utama masing-masing membantu membentuk garis pemisah dengan dunia kuno dan abad pertengahan dan berpengaruh dalam membentuk masyarakat dan olitik hingga abad ke-21, revolusi Prancis 1789 salah satunya yang merupakan pemberontakan masyarakat Prancis atas kekuasaan Feodal yang berlaku, dimana politik kenegaraan dipegang secara absolute oleh raja dan hak-hak rakyat dibatasi oleh hukum yang dibuat gereja. Revolusi Prancis menggambarkan kejenuhan rakyat prancis akan sistem feodal yang dianut dan menginginkan demokrasi sebagai sistem yang baru dimana hak rakyat dapat dilindungi oleh Negara.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Samuel P. hutington, Trj. Sahat Simamora dan Suryatim, *tertib politik pada masyarakat yang sedang berubah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), Hlm 316

Perkembangan dunia Barat yang kini maju peradabannya tidak terjadi begitu saja, melainkan terdapat Sumbangsih pemikiran Muslim pada pemikir Barat seperti pemikir muslim Al-Farabi yang merupakan perintis prinsip kenegaraan, pandangan politik al-Farabi politik harus didasari usaha konsepsi bersama dari manusia untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, menurut al-Farabi Negara itu berasal dari masyarakat kota, untuk membicarakan soal Negara harus dimulai dengan manusia yang akan menjadi warga Negara dan membentuk masyarakat. 12 Al-farabi juga menjelaskan warga Negara yang ideal, yakni Negara dibentuk berdasarkan atas kemauan manusia yang sama kepentingannya serta sama akan tujuannya dan dipimpin oleh seorang kepala negara utama haruslh seorang filsuf yang memiliki kearifan dan yang mempunyai akal tingkat mustafad, yang dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh, pengatur bumi ini. 13 Kemauan yang sama iniah yang dikemukakan di kemudian hari oleh J.J Rousseau dengan istilah volunte generale.

Kontribusi pemikiran Yunani Klasik juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan peradaban baru di dunia Barat. Filsuf besar Yunani seperti Plato merupakan pencetus teori Negara dan Masyarakat. Bagi plato negara ideal adalah polis sehingga hubungan rakyat dengan negara tidak ada lembaga yang menjembatani.

# E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut.:

<sup>12</sup> Firdaus, syam. *Op.cit*, Hlm 63

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Op. cit. Hlm 64

### 1. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode analisis komparatif yakni penelitian yang bersifat membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran.

### 2. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, merupakan jawaban atas pernyataan penelitian terhadap masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu mencari jawaban mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Konsep Masyarakat dalam pandangan Jean-Jacques Rousseau dan al-Farabi.
- b. Penyelenggaraan Negara dalam pandangan Jean-Jacques Rousseau dan al-Farabi
- Landasan Pemikiran Jean-Jacques Rousseau dan al-Farabi tentang
   Masyarakat dan penyelenggaraan Negara..

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori yaitu:

a. Sumber data Primer

Yaitu sumber data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer ini merupakan tulisan yang ditulis langsung oleh tokoh pemikiran politik Jean-Jacques Rousseau yaitu *Du contract social* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Perjanjian Sosial.

## b. Sumber data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data tertulis dan teoritis mengenai informasi tambahan yang mendukung data primer. Yakni:

- Political Theory, Pemikiran Machiavelli Rawls (Kajian klasik dan Kontemporer.
- Sejarah, Filsafat dan Ideologi Pemikiran Politik Barat
- Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia
   Kontemporer
- Ilmu Negara dalam Multi Perspektif

# c. Sumber data Tersier

Penulisan ini juga dilengkapi dengan sumber data tersier yang tercantum pada daftar pustaka.

# 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan teknik book survey. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Maksud studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan pembahasan Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau.

### 5. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian dalam pendekatan sejarah. Untuk itu penulis menganalisa menggunakan metode sejarah, yaitu proses pengumpulan data kemudian menafsirkan suatu gejala peristiwa atau gagasan yang muncul di masa lampau. <sup>14</sup> penulis mengumpulkan data (*Heuristik*), kritik sumber (*verifikasi*), penafsiran (*interprestasi*), dan penyusunan sejarah (*Histobiografi*). <sup>15</sup>

- a. Mengumpulkan seluruh data (*Heuristik*) mengenai sumber-sumber terkait dengan penelitian ini.
- b. Kritik sumber (*verifikasi*) Mengadakan mengklasifikasi seluruh data dan jenis data yang telah ditemukan atau pemeriksaan keabsahan data melalui method *book survey*.
- c. Penafsiran (*interprsetasi*) tahap analisis atau menguraikan, penulis Menghubungkan data yang ditemukan dengan data lain yang mendekati kebenaran jika ditemukan data yang berbeda dalam suatu permasalahan yang berbeda. dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. *Histobiografi*, merupakan langkah terakhir dalam menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah. Histobiografi ini merupakan hasil penafsiran hasil penelitian mengenai biografi Jean Jacques Rousseau.
- e. Menarik kesimpulan dan mengacu kepada rumusan masalah penelitian.

15

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Louis gootschlm.k, Trj. Nugroho notosusanto, *Mengerti sejarah* (Jakarta: UI Press, 1986) Hlm 32

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta:Bentang Budaya, 2001) Hlm 84